

**TINJAUAN SIYÂSAH TASYRÎ'YYAH TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Akbar Galih Pamungkas

Nim. 05020421024



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Galih Pamungkas
NIM : 05020421024
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Reformulasi Regulasi Perlindungan Hukum Petugas
KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 05 Mei 2025



Akbar Galih Pamungkas
NIM. 05020421024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Akbar Galih Pamungkas

NIM : 05020421024

Judul : Reformulasi Regulasi Perlindungan Hukum Petugas KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 05 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.

NIP. 197208062014112001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Akbar Galih Pamungkas

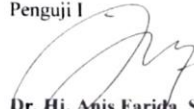
NIM. : 05020421024

Judul : Tinjauan Siyâsah Tasyrî'iyah Terhadap Perlindungan Hukum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia.

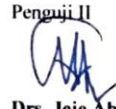
Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001

Penguji II


Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji III


Achmad Sufiudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji IV


Moh. Faizur Rohman, M.H.I.
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 17 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,


Dr. H. Sugiyah Musata'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSetujuan PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Akbar Galih Pamungkas
NIM : 05020421024
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : ~~galih.pamungkas@gmail.com~~ galih.pam1607@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Syarah Tasyri'iyah Terhadap Perindungan Hukum
kelompok pendengara pemungutan suara dalam penyelenggaraan
Pemilihan Umum Di Indonesia.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Juli 2025

Penulis



(Akbar galih pamungkas)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Kelompok penyelenggara pemungutan suara merupakan badan ad hoc penyelenggaraan pemilu dalam menjalankan tugasnya mempunyai problematika terkait perlindungan hukum yang didapat. Dimana terjadinya perubahan sistem pemilu, KPPS terdampak secara signifikan terhadap beban kerja dan waktu kerja, yang secara tidak langsung menimbulkan resiko yang tinggi, akan tetapi resiko tersebut tidak sebanding dengan perlindungan yang didapat. Pengaturan-pengaturan penyelenggaraan pemilu belum secara komprehensif mengatur perlindungan hukum petugas KPPS sehingga dalam kurun waktu 2 (dua) periode penyelenggaraan pemilihan umum serentak masih terjebak dengan bayang-bayang yang sama tanpa ada perbaikan terkait perlindungan KPPS. Sehingga skripsi ini akan membahas terkait rumusan masalah: 1) Mengetahui Pengaturan perlindungan hukum petugas KPPS dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. 2) Mengetahui tinjauan Siyâsah Tasyrî'iyah terhadap perlindungan hukum petugas KPPS dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menguraikan perlindungan hukum petugas KPPS dengan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Kemudian penulis menguraikan konsep perlindungan hukum serta konsep siyasah tasyri'iyah yang menekankan kebijakan dibuat untuk kemaslahatan umat dan mengaitkannya dengan perlindungan hukum yang didapat petugas KPPS dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan kerangka pemikiran serta objek pembahasan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dan menjelaskan bahan hukum yang bersifat kualitatif baik berupa bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang diperoleh menggunakan teknik *libraryresearch*.

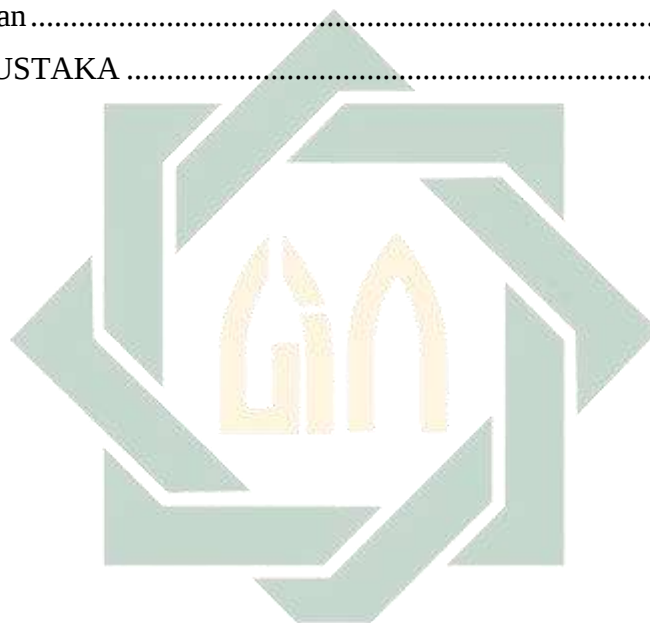
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) kurangnya pengaturan perlindungan hukum yang didapat petugas KPPS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu ini terlihat dimana beban dan waktu kerja yang tinggi mengakibatkan resiko atas kecelakaan kerja tinggi yang didapat petugas KPPS. Akan tetapi resiko ini tidak sepadan dengan perlindungan hukum yang didapat petugas KPPS dalam pengaturan penyelenggara pemilu, sehingga hal ini mengakibatkan dua kali penyelenggaraan pemilu serentak terdapat permasalahan mengenai kecelakaan kerja petugas KPPS. 2) Berdasarkan perspektif Siyâsah Tasyrî'iyah, dalam kaidah "*Tasharruf al-imâm 'alâ al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah*" menegaskan bahwa pemerintah wajib menetapkan hukum dengan didasarkan pada kemaslahatan umat, serta kadilan sbagai dasar dalam penerapan hukum. Sehingga pengaturan perlindungan hukum petugas KPPS harus sesuai dengan prinsip Siyâsah Tasyrî'iyah.

Sejalan dengan kesimpulan penelitian ini, penulis menyarankan untuk pemerintah dapat melakukan penguatan perlindungan hukum petugas KPPS melalui perubahan peraturan penyelenggaraan pemilu terkait: 1) Pemberian jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan. 2) Pengaturan waktu kerja.

DAFTAR ISI

SAMPUL SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Definisi Oprasional.....	19
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN UMUM SIYÂSAH TASYRÎ'YYAH DALAM KETENEGARAAN ISLAM DAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM.....	29
A. Fiqih Siyâsah Tasyrî'yyah	29
B. Teori Perlindungan Hukum	34
BAB III ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PETUGAS KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU	39
A. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia.....	39
B. Landasan Konstitusional Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu.	43
C. Perlindungan Hukum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	47
D. Disharmonisasi Hukum dalam Pemberian Perlindungan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	52
E. Problematika Perlindungan Hukum Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia.....	59

BAB IV ANALISIS FIQIH SIYÂSAH TASYRÎ'YYAH TERHADAP REFORMULASI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM	64
A. Kedudukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilu Perspektif Ketenegaraan Islam.....	64
B. Tinjauan Siyâsah Tasyrî'yyah Terhadap Perlindungan Hukum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	68
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku dan Jurnal

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Aly, Sirojuddin. "Paradigma Pemilihan Kepala Negara Di Zaman Khulafa Al-Rasyidin." *Journal Refleksi* Vol. 7 (2005).,
- Ardipandanto, Aryojati. "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019." *Info Singkat* Vol. 11, No. 11 (2019).
- Ariviani, Rubian, Hasyim Asy'ari, and Untung Sri Hardjanto. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, No. 4 (2016).
- Benuf, Kornelius. "Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019." *Gema Keadilan* 6, no. 2 (2019).
- . "Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019." *Gema Keadilan* 6, no. 2 (September 24, 2019).
- Chairunnisa, Titania, and Icha Cahyaning Fitri. "Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Penyelenggara Pemilu Sebagai Upaya Peningkatan." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* Vol. 8. No. 6 (2024).
- Dedi, Agus. "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak." *Jurnal Moderat* 5 (2019).
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. 1st ed. 1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fahri Ramadhana, Akhmad. "Perlindungan Hukum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pelaksanaan Pemilu Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia." *Universitas Lambung Mangkurat* (2020).
- Febriansyah, Ricky, and Ana Husnayanti. "Analisis Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Menggunakan Metode FTE (Full Time Equivalent) Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Kabupaten Bangka Tengah." *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 1 No.1 (2019).

- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 8th ed. St. Paul, MN: Thomson West, 2004.
- Ghulam Rahmadipadma, Mirza, and Hananto Widodo. "Perlindungan Hukum Bagi Panitia Penyelenggara Pemilu Ketika Mengalami Kecelakaan Kerja Dalam Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum." *NOVUM: Jurnal Hukum UNESA* (2024).
- Hadi, M. Nur. "Tinjauan Siyasah Tasri'iyah Terhadap Pembentukan Pergub DIY No 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapatan Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka." *UINSUKA* (2024).
- Hamdaris, Hamka. "Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara." *UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR* (2020).
- Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makasar: Pusaka Almaida, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2012.
- Jiwa Tajaswari, Visi, and Anom Wahyu Asmorojati. "Bentuk Pertanggungjawaban Konstitusional Pemerintah Terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Meninggal Dunia Dalam Pemilu: Tragedi Demokrasi Penyelenggaraan Pemilu 2019?" *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* (2021).
- Kadenun. "Proses Peralihan Kekuasaan Dan Kebijakan Dalam Pemerintahan Khulafaurrasyidin." *Al-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 1 No. 2 (2021).
- Kristian, and Sunny Ummul Firdaus. "Harmonisasi Hukum: Pengaturan Pemilu Serentak Dan Perlindungan Hukum, Analisis Yuridis Terhadap Kematian Kpps Tahun 2019." *Res Publica* Vol 4, No. 1 (2020).
- Laksmi Candra Amalia. "Perlindungan Hukum Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang Meninggal Dunia Dalam Menjalankan Tugasnya." *Jurist-Diction* 5, no. 4 (July 31, 2022).
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Manoppo, Robyy A.M. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu Badan Ad Hoc Kpps Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pemilu." *Jorunal KPU* (2019).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Misran. "Al-Maslahah Mursalah." *Jurnal UIN Ar-Raniry* (2020).
- Pandiangan, Andreas. "Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja." *The Journal of Society & Media* 3, no. 1 (April 30, 2019).
- Perwira, Daniel, Alex Arifianto, Asep Suryahadi, and Sudarno Sumarto. "Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia." *Lembaga Penelitian SMERU* (2003).
- Raharjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2021.
- . *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Ilmu Hukum*. Cet. 8. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Raohatul Hayat, Aay Siti. "Formula Pemeliharaan Jiwa (hifz al-nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* Vol. 1 (2020).
- Samsu, La. "Al-Sultāh Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultāh Al-Tanfiziyyah, Al-Sultāh Al-Qaḍa'iyyah." *Jurnal Tahkim* (2017).
- Santoso, Topo, and Ida Budhiati. *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan: Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum : Legal Research*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Tajaswari, Visi Jiwa, and Anom Wahyu Asmorojati. "Bentuk Tanggung Jawab Konstitusi Pemerintah Terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Dalam Pemilu 2019: Tragedi Demokrasi Pemilu." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021).
- Teti Nahak, Uncianus, Kristifosa Akwila, and Lely Mahartina. "Hubungan Kerja Kpu Dengan Kpps Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019." *Jurnal Perspektif* Vol. 24 No. 3 (2019).

Wahyudi F. "Peran KPPS dalam Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol 7 (2019).

Yamani, Akhmad Zaki, Muhibin, and Hasani Zakiri. "Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah." *Jurnal Syntax Idea* Vol. 6 No. 3 (2024).

Yudesman. "Prinsip-Prinsip San Kaidah Hukum Islam." *STANI Kerinci* 11 (2014).

Peraturan Perundnag-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022.

PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

Artikel Website dan Brief

Sunnatullah. "Sejarah Hukum Islam Atau Periodisasi Tarikh Tasyri Dalam Islam." *NU Online*, 2022. Accessed April 23, 2025. <https://nu.or.id/syariah/sejarah-hukum-islam-atau-periodisasi-tarikh-tasyri-dalam-islam-wNicZ>.

Prasetiadi, Yan s. "Membaca Kembali Fiqih Siyasah." *Tren Opini*, 2023. Accessed March 5, 2025. <https://www.trenopini.com/2023/01/membaca-kembali-fiqih-siyasah.html>.

"Kemenkes Soroti Jam Kerja KPPS Yang Overtime, Berikut Aturan Jam Kerja Normal." *Tempo*, 2024. Accessed January 5, 2025. <https://www.tempo.co/gaya-hidup/kemenkes-soroti-jam-kerja-kpps-yang-overtime-berikut-aturan-jam-kerja-normal-400825>.

"Ketua KPU Ungkap Total 181 Anggota PPK-KPPS Pemilu 2024 Meninggal Dunia." *detikNews*, 2024. Accessed January 5, 2025. <https://news.detik.com/pemilu/d-7260232/ketua-kpu-ungkap-total-181-anggota-ppk-kpps-pemilu-2024-meninggal-dunia>.

"Total 554 Orang KPPS, Panwas Dan Polisi Tewas Di Pemilu 2019." *CNN Indonesia*, 2019. Accessed November 28, 2014. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>.

Sunnatullah. "Sejarah Hukum Islam Atau Periodisasi Tarikh Tasyri Dalam Islam." *NU Online*, 2022. Accessed April 23, 2025. <https://nu.or.id/syariah/sejarah-hukum-islam-atau-periodisasi-tarikh-tasyri-dalam-islam-wNicZ>.

Prasetiadi, Yan s. "Membaca Kembali Fiqih Siyasah." *Tren Opini*, 2023. Accessed March 5, 2025. <https://www.trenopini.com/2023/01/membaca-kembali-fiqih-siyasah.html>.

Khotimah, Husnul. "The Power of 'Hifzu an Nafs': Urgensi Manusia Sebagai Variable Penting Atas Hukum Allah." *Pesantren.Uii*, 2023. Accessed February 5, 2025. <https://pesantren.uui.ac.id/the-power-of-hifzu-an-nafs-urgensi-manusia-sebagai-variabel-penting-atas-hukum-allah/>.

dkk, Waryuni. "Memahami Kaidah Fiqih Tasharruf Al-Imam 'Ala Alra'Iyyah Manuthun Bil-Maslahah." *scribd* (n.d.). Accessed April 5, 2025. https://www.scribd.com/document/820567931/Kelompok-3-Qowaid?utm_source=chatgpt.com.

Aditiya, Nicholas Ryan, and Ihsannudin. "KPU Ungkap 181 Petugas Pemilu Meninggal Pada 14-25 Februari." *Kompas.Com*, 2024. Accessed November 28, 2024. https://nasional.kompas.com/read/2024/03/25/13462131/kpu-ungkap-181-petugas-pemilu-meninggal-pada-14-25-februari#google_vignette.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A